

BERKEDOK PROGRAM MAGANG DI JERMAN

Empat Mahasiswa Jadi Korban TPPO

JAKARTA (KR) - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus program magang untuk mahasiswa ke Jerman atau *ferien job*. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan KBRI di Jerman terkait empat mahasiswa yang mendaratangi KBRI karena program magang tersebut.

"Para mahasiswa dipekerjakan secara non-prosedural sehingga mengakibatkan mahasiswa tereksplloitasi," kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro di Jakarta, Rabu (20/3).

Jenderal polisi bintang satu itu menyebutkan ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka, terdiri atas tiga orang perempuan dan dua orang laki-laki. Tersangka perempuan, yakni ER alias EW (39), A alias AE (37) dan AJ (52). Sedangkan laki-laki, inisial AS (65) dan MZ (60). Dua dari lima tersangka saat ini masih berada di Jerman (ER dan A).

8 Juta

Seperti kemudahan akses seiring dibangunnya berbagai infrastruktur pelengkap atau Jalur Tol Yogya-Solo yang sebagian sudah beroperasi. Selain itu karena berbagai pertimbangan.

Sebagian besar pemudik diprediksi akan menggunakan kendaraan pribadi. Untuk itu, diimbau agar lebih berhati-hati

Dinilai

Gibran pun dinilai melanggar peraturan pemilu lantaran dianggap berkampanye sebelum waktu yang telah ditetapkan KPU yakni 28 Februari 2024. Tidak hanya itu, Gibran juga dituding melibatkan kepala desa dalam kampanye serta memberikan uang transport.

"Perbuatan yang dilakukan terlapor (Gibran) adalah yang dilarang berupa kampanye di luar jadwal sebagai ketentuan pasal 492 UU Pemilu. Perlibatan kepala desa dan perangkat desa sebagaimana ketentuan kampanye sebagai mana pasal 280 ayat 2 huruf H, huruf I dan huruf J UU Pemilu serta politik uang dalam bentuk pemberian uang transpor," kata I Dewa membacakan hasil pemeriksaan.

Namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti Bawaslu karena dianggap tidak memenuhi syarat materiil. "Laporan pengadu satu tidak diregistrasi karena alasan tidak memenuhi syarat materiil. Alasan tidak memenuhi syarat materiil justru menjadi tanda tanya bagi pengadu selaku pelapor dalam laporan itu," kata I Dewa.

Pengadu, lanjut Dewa, juga tidak diberikan kesempatan untuk klarifikasi ter

Roh

Penyair dan dramawan Rendra mengatakan : *"Negara dan pemerintah adalah badan. Adapun kalangan cendekiawan, seniman dan budayawan adalah roh. Roh yang menggerakkan badan demi kesesuaian antara laku dan cita-cita kolektif"*. Jika badan berjalan sendiri tanpa roh maka ia tak berbeda dengan mesin yang bergerak samaunya dan berpotensi destruktif. Negara/pemerintahan bisa menjelma menjadi kekuatan berwatak otoriter dan diktator. Negara yang semestinya melindungi warga negara berpotensi menjadi ancaman dan horor bagi rakyat.

Politik di dalam penyelenggaraan negara/pemerintahan harus sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai konstitusi. Seluruh amanat konstitusi mengandung tanggung jawab bagi penyelenggara negara/pemerintah untuk menciptakan kecerdasan, keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Tanpa prinsip dan nilai konstitusi negara akan menjelma menjadi ruang pesta bagi penguasa dan kaum oligarki. Politik tanpa prinsip nilai itu yang kini digisahkan oleh sebagian besar publik, terutama kalangan yang kritis dan memiliki komitmen pada nasib rakyat.

Beberapa dari tersangka merupakan pihak kampus.

Terkait kronologi kasus ini, Djuhandhani menjelaskan, dari keterangan keempat mahasiswa yang mengikuti program ferien job di Jerman, dilakukan pendalaman. "Hasil yang didapatkan dari KBRI bahwa program ini dijalankan oleh 33 universitas yang ada di Indonesia dengan total mahasiswa yang diberangkatkan sebanyak 1.047 mahasiswa yang terbagi di tiga agen tenaga kerja di Jerman," ungkapnya.

Informasi dari KBRI di Jerman ditindaklanjuti oleh penyidik Satgas TPPO Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari hasil penyidikan terungkap beberapa fakta, yakni mahasiswa awal mula mendapat sosialisasi program magang ke Jerman dari CV GEN dan PT SHB.

Pada saat pendaftaran, mahasiswa dibebankan membayar uang pendaftaran Rp 150.000 ke rekening atas nama CV GEN dan juga membayar sebesar 150 Euro (sekitar Rp 250.000 lebih) untuk

mengingat beberapa ruas jalan ada yang belum optimal digunakan sebagai jalur mudik atau lalu lintas kendaraan. Misalnya Jalan Godean dan jalan di daerah Galur.

"Banyak lobang yang jika terkena hujan akan seperti kolam. Untuk itu kami bersama Dinas PUP ESDM sudah mem-

hadap laporan tersebut, sehingga pengguguran laporan terkesan hanya sepihak. I Dewa menjelaskan, alasan Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut lantaran pasal yang disangkakan pelapor tentang dugaan politik uang dan pelanggaran kampanye hanya berlaku jika peristiwanya terjadi saat masa pemilu.

"Para teradu juga menjelaskan, pasal yang disangkakan oleh pelapor merupakan tindak pidana pemilu namun berdasarkan ruang lingkup kampanye seusai lampiran PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu sebagaimana diubah dengan PKPU nomor 20 tahun 2023 dimulai pada tanggal 28 November 2023 dan berakhir pada 10 Februari 2023," jelasnya.

Hal ini yang membuat Bawaslu dianggap melanggar ketentuan peraturan pemilu serta dinilai tidak bekerja secara profesional. DKPP menilai terhadap tindakan para teradu terkait penanganan laporan dengan nomor 07 dan seterusnya tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika.

"Sebagai pengawas pemilu para teradu

Menurut pejuang kemanusiaan Mahatma Gandhi, politik yang dijalankan tanpa prinsip keadilan dan kemanusiaan merupakan salah satu dosa sosial yang harus direnungkan. Adapun enam dosa sosial yang lain adalah kekayaan tanpa kerja keras, pemiagaan tanpa moralitas, kesenangan tanpa nurani, pendidikan tanpa karakter, ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan, dan peribadatan tanpa pergorbanan.

Politik tanpa prinsip keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, kebebasan dan kesejahteraan merupakan bentuk pengingkaran atas etika dan moralitas. Politik mengalami reduksi dari wahana kultural yang berpotensi membangun kebaikan dan keadaban kolektif menjadi sekadar alat untuk melanggengkan kekuasaan. Ketika politik tanpa prinsip etika dan moral itu dijalankan dengan sadar. Termasuk di dalam memperlakukan hukum dan demokrasi. Politik ala Machiavelli pun terjadi.

Kini saatnya penyelenggara negara dan pemerintahan berendah hati untuk sudi mendengar dan menyerap seluruh pandangan yang bernilai dari kalangan cendekiawan. Semua masukan harus disikapi

pembuatan letter of acceptance (LOA) kepada PT SHB. "Karena korban sudah diterima di agency runtime yang berada di Jerman dan waktu pembuatannya selama kurang lebih dua minggu," ujarnya.

Setelah LOA tersebut terbit, para mahasiswa yang menjadi korban diminta membayar sebesar 200 Euro (sekitar Rp 3,5 juta) kepada PT SHB untuk pembuatan approval otoritas Jerman (working permit) dan penerbitan surat tersebut selama 1-2 bulan. "Ini nantinya menjadi persyaratan dalam pembuatan visa," kata Dju.

Selain itu, lanjutnya, para mahasiswa dibebankan menggunakan dana talangan sebesar Rp 30 juta - Rp 50 juta yang nantinya akan dipotong dari penerimaan gaji setiap bulannya. Tidak hanya sampai di situ, para mahasiswa setelah tiba di Jerman langsung disodorkan surat kontrak oleh PT SHB dan working permit untuk didaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja Jerman. "Surat dalam bentuk bahasa Jerman yang tidak dipahami oleh para mahasiswa," katanya. **(Ant/Has)-f**

berikan tanda di jalan yang berlobang itu agar bisa dihindari masyarakat. Adapun untuk penerangan jalan umum kita ada perawatan tetap rutin. Itu kami lakukan baik Lebaran maupun tidak, terutama saat libur Lebaran ada petugasnya yang selalu keliling bersama jajaran ATCS dan Tim Patroli," paparnya. **(Ria)-f**

semestinya memiliki kemampuan dalam memahami perundang undangan secara luas. Alasan para teradu mendefinisikan kampanye di luar jadwal berdasarkan yurisprudensi laporan kampanye pada penanganan laporan dan temuan Pemilu 2019 tidak dapat dibenarkan secara hukum dan etika," kata I Dewa.

Selalu itu, Bawaslu juga seharusnya memberikan ruang bagi pengadu untuk mengklarifikasi aduannya. Bukan justru membatalkan secara sepihak. Oleh karena itu, jajaran Bawaslu dalam hal ini dianggap tidak profesional dan melanggar etika dalam menjalankan pengawasan.

"Para teradu terbukti tidak profesional dan tidak berperasaan hukum dalam menangani laporan nomor 17 dan seterusnya dan melanggar ketentuan Pasal 6 ayat huruf a dan f Pasal 11 huruf a dan C dan 15 huruf b peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum Nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan penyelenggara pemilu. Dengan demikian para teradu terbukti melanggar kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu," kata I Dewa. **(Ant/Obi)-f**

sebagai upaya untuk menemukan nilai-nilai alternatif bahkan juga nilai yang relatif ideal agar negara dan bangsa ini tidak mengalami berbagai guncangan. Egoisme elite penguasa perlu dikendalikan dan dicairkan menjadi nilai-nilai yang bijak dan sesuai keadaan bangsa. Begitu pula nafsu besar ingin selalu berkuasa. Bukankah para pendiri bangsa dan negara sejak awal sudah wanti-wanti untuk selalu berbagi dan bukan melakukan dominasi. Ini seperti lirik puisi penyair Kirdjomulyo: *jiwa di tanah airmu adalah jiwa untuk berbagi*.

Kalangan cendekiawan kampus sudah sepatutusnya memberikan peringatan kepada penguasa. Mereka punya hak untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari keterpurukan etika, moral dan nilai-nilai di dalam penyelenggaraan negara/pemerintahan. Kewajiban mereka adalah kewajiban moral yang bertalian dengan nabi bangsa dan eksistensi negara. Kita justru harus bersyukur cendekiawan sebagai roh peradaban itu tetap hidup. Di tengah para intelektual yang tega menggadaikan integritasnya pada kekuasaan. *(Penulis adalah praktisi budaya dan esais)-d*

DALAM KASUS PENODAAN AGAMA

Panji Gumilang Divonis 1 Tahun

INDRAMAYU (KR) - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Indramayu, Jawa Barat, menjatuhkan vonis satu tahun penjara kepada Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang, selaku terdakwa dalam perkara tindak pidana penodaan agama.

Ketua Majelis Hakim PN Indramayu Yogi Dulhadi dalam sidang di Indramayu, Rabu (20/3) menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama.

Ia menyebut tindakan Panji Gumilang itu telah melanggar ketentuan yang diatur pada Pasal 156 a huruf a KUHP, sehingga terdakwa dijatuhi pidana satu tahun penjara. "Mengadili terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Oleh karena terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama satu tahun," katanya.

Dalam persidangan, Majelis Hakim juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Panji Gumilang bakal dikurangi seluruh-

Tak Terkait

Kawasan konservasi dan kawasan lindung yang dulu dibuka untuk kawasan komersial dan perumahan harus dikembalikan lagi fungsinya sebagai zona resapan air.

Kegiatan pengambilan air tanah secara berlebihan juga harus dikurangi dengan membangun bendungan yang berfungsi sebagai sumber air bersih bagi masyarakat setempat, seperti Waduk Jatibarang di Semarang dan Waduk Jati Gede di Indramayu.

"Apakah banjir terjadi lautn lagi? Menurut pandangan kami itu tidak akan terjadi. Faktor utama kalau itu (daratan) kembali menjadi selat adalah kenaikan muka air laut," kata Eko.

Eko Soebowo mengungkapkan, aktivitas pembabatan hutan secara besar-besaran yang dilakukan pada era kolonial telah menimbulkan sedimentasi yang menyebabkan Selat Muria menjadi daratan. "Dulu waktu zaman Belanda pembabatan hutan di sana sangat intens, sehingga menyebabkan erosi. Sedimentasi yang terjadi menyebabkan Selat Muria menjadi daratan," katanya.

Eko menjelaskan, sejak Abad ke-7 sampai sekarang, aktivitas pembabatan hutan maupun

Prabowo

Prabowo-Gibran unggul di 36 provinsi, sedangkan Anies-Muhammad meraih perolehan suara terbesar di dua provinsi (Aceh dan Sumatera Barat). Sementara itu, Ganjar-Mahfud tidak memenangi satu pun provinsi.

Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhammad Iskaning pasangan calon nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka paslon nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. paslon nomor urut 3.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Pelantikan pasangan calon terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Sebelumnya, 1 Oktober 2024, diagendakan pelantikan calon terpilih anggota DPR RI dan DPD RI.

Disebutkan dalam Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil Pemilu

nya dari pidana yang dijatuhkan. Kendati begitu, pihaknya meminta terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. "Kami menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan terdakwa tetap ditahan," tuturnya.

Selain itu, kata Yogi, barang bukti dalam perkara tersebut berupa satu keping Compact Disc-Recordable (CD-R) berisikan cuplikan video beserta dokumen lainnya diminta untuk dimusnahkan. "Selanjutnya, barang bukti sebuah akun YouTube atas nama Al-Zaytun Official sampai dengan barang lainnya dirampas untuk negara," ujar Yogi.

Majelis Hakim menambahkan, setelah dijatuhi vonis, terdakwa harus membayar biaya perkara yang dibebankan sebesar Rp 5.000.

Sementara itu setelah persidangan, terdakwa Panji Gumilang enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait vonis yang ditetapkan oleh Majelis Hakim PN Indramayu kepada dirinya. "Kan sudah dengar semua, pikir-pikir saja dulu," ucapnya. **(Ant)-d**

erosi terus terjadi di Selatan Selat Muria maupun Lereng Gunung Muria. Material dari erosi itulah yang mengisi dataran Selat Muria. Sedimentasi itu muncul terbawa banjir yang terjadi akibat pembabatan hutan membuat selat semakin dangkal dan menghilang, sehingga Pulau Jawa menyatu dengan Pulau Muria.

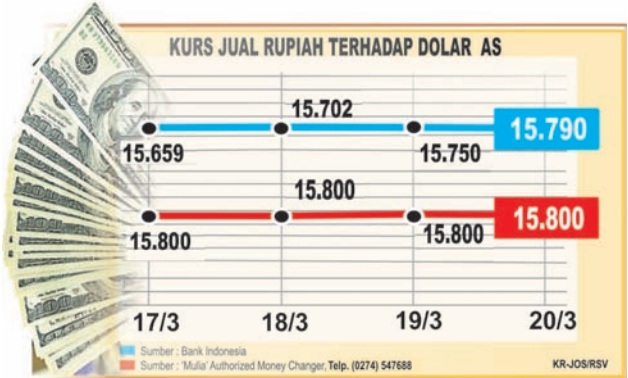
Menurutnya, umur daratan yang tergolong baru akibat proses sedimentasi membuat tanah belum kompak dan belum mengalami pematatan yang sempurna. Tanah lunak tersebut menyebabkan bangunan menjadi mudah ambles. "Dulu banjir justru mengisi sedimen di Selat Muria, akhirnya terjadi pendangkalan, sehingga terbentuk daratan," kata Eko.

Ia mengingatkan masyarakat agar bijaksana dalam penggunaan air. Kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan secara berlebihan telah membuat kawasan Demak hingga Kudus mengalami penurunan muka tanah yang parah. Perubahan iklim yang mencairkan es di Kutub Utara dan Selatan meningkatkan muka air laut dan menjadi ancaman serius yang berpotensi memunculkan kembali Selat Muria.

Brimob membawa pelontar gas air mata. Penjagaan di sekitar gedung KPU juga diperketat.

Tidak hanya massa panolak hasil pemilu, sejumlah massa pendukung hasil Pemilu 2024 kemarin juga memadati depan gedung KPU. Mereka meminta kepada penolak hasil Pemilu 2024 untuk legawa menerima.

"Jangan memprovokasi masyarakat untuk menolak hasil pemilu yang telah diselenggarakan," kata salah satu orator. **(Ant/Obi)-f**



Prakiraan Cuaca					Kamis, 21 Maret 2024	
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dimi Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95
Cerah	Berawan	Udara Kabur	Hujan Lokal	Hujan Pelir	Gratis - Arko	

Peran Budaya dalam Kegiatan Ekonomi



Atika Fatimah, SE MEc Dev
Dosen Prodi Ekonomi
Universitas Amikom Yogyakarta

SESUAI dengan UU 3/1950 Yogyakarta merupakan sebuah daerah istimewa setingkat provinsi. Terdapat tiga hal yang membuat Yogyakarta menjadi istimewa yakni istimewa dalam hal sejarah, istimewa dalam bentuk pemerintahan yang terdiri

penggabungan dua wilayah Kesultanan dan Pakualaman menjadi satu daerah setingkat provinsi yang bersifat kerajaan serta istimewa dalam hal kepala pemerintahan yang dijabat oleh Sultan dan Adipati. Namun tidak hanya itu saja yang membuat Yogyakarta istimewa tetapi keistimewaan lainnya dari Yogyakarta adalah nilai dan budaya yang berkembang di masyarakat. Salah satu contoh budaya yang berkembang di masyarakat Yogyakarta adalah andhap ashor. Andhap ashor merupakan perilaku yang rendah hati, sopan santun, saling menghormati dan menghargai, tidak sombong dan sesuai dengan norma yang ada di masyarakat seperti nuwun sewu (permissi untuk meminta izin), nderek langkung (memohon izin)

dan klamit (meminta izin pada orang lain).

Kenyataannya, perilaku andhap ashor ini jarang ditemui di tengah kota Yogyakarta dan anak muda lebih sering menyuarakan kultur skena. Skena adalah kepanjangan dari sua, cengkerama dan kelana yaitu perkumpulan kolektif yang bisa menciptakan suasana untuk bercengkerama sampai berkelana bersama saat berkumpul. Misalnya ketika perkumpulan itu penggemar musik punk maka mereka bisa disebut dengan Skena Punk. Oleh karena itu, anak muda yang ada di Yogyakarta seharusnya mengetahui istilah-istilah nuwun sewu, nderek langkung dan klamit yang merupakan budaya Yogyakarta. Unikinya budaya yang ada di

Yogyakarta hingga menjadikannya istimewa tidak lepas dari pentingnya budaya dalam kehidupan sehari-hari. Budaya ini akan mempengaruhi perilaku individu dalam suatu lingkungan karena individu yang terus menerus menerima pengaruh yang sama dalam lingkungan tertentu maka akan cenderung terpengaruh sehingga perilakunya akan sesuai dengan budaya di lingkungan tersebut. Pengaruh budaya terhadap perilaku individu anggotanya dapat dilihat dari aspek moral. Aspek moral budaya meliputi kebiasaan kelompok yang akan mendorong perilaku seseorang untuk memperlakukan orang lebih baik seperti kejujuran. Dengan adanya kejujuran maka seseorang akan lebih percaya

dalam melakukan transaksi sehingga akan mendorong efisiensi pada kelompok tersebut. Hal ini juga berlaku pada kegiatan ekonomi dimana kejujuran juga bisa memperbaiki keputusan individu sehingga dapat menurunkan biaya transaksi yang dari aspek moral akan mengkompensasi hak kepemilikan yang hilang. Turunnya biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi akan meningkatkan keuntungan usaha. Peningkatan keuntungan nantinya akan mendorong terjadinya investasi aset atau pembentukan modal.

Sedangkan kompensasi hak kepemilikan yang hilang akan mempermudah terjadinya transaksi dalam kegiatan ekonomi. Adanya kompensasi hak kepemilikan tersebut akan



membuat seorang individu memiliki hak menggunakan dan memindahkan atas aset yang dimiliki. Pada gilirannya, hak kepemilikan akan memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi sehingga berimplikasi pada rendahnya biaya transaksi yang terjadi. Rendahnya biaya transaksi ini akan memberikan insentif ekonomi yang lebih baik bagi pelakunya. Maka dari itu, budaya memiliki peran tidak langsung dalam mendorong kegiatan ekonomi sehingga masyarakat perlu melestarikan budaya selama ini telah ada atau berkembang secara turun-temurun. ***